

Produk Dalam Negeri Tumbuh, Usaha Mikro-Kecil Tangguh, Daerah Sejahtera, Indonesia Maju

Abdullah Azwar Anas
Kepala LKPP

ARAHAN PRESIDEN

Joko Widodo

TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat

Rabu, 17 November 2021 | 19:12 WIB

Oleh: Lenny Tristia Tambun / FFS



Joko Widodo. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM

Oleh: Abdul Basith Bardan

Rabu, 18 November 2020 15:12 WIB



- 1 Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 2 Tingkatkan Porsi UMKM & Koperasi
- 3 Percepat Penyerapan APBN/APBD

Orientasi LKPP:

Melayani Stakeholder
untuk Pemulihan Ekonomi



Orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan/ mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-koperasi.



Nasional/LKPP

Sektoral [K/L]

Lokal [Pemda]



**Salah satunya
BELA PENGADAAN
untuk UMKM**

**Investasi
Tumbuh**

.....
**Lapangan
Kerja
Terbuka**

.....
**Daerah
Sejahtera**

.....
**Tetap Taat
Aturan**

EKOSISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

BIG DATA

BIG DATA

Peningkatan Produk Dalam Negeri

Kemenperin

Integrasi
TKDN
dan
e-katalog

Kem. Investasi/ BKPM

Integrasi OSS
dengan SPSE-SIKAP
dan e-Katalog

Spending
Analysis untuk ajak
investor
kembangkan PDN:
10 produk impor
terbesar

Peningkatan UMK-KOPERASI

Kemenkop UKM

Peningkatan kapasitas
shortlist UMK/Koperasi
terlaku di sistem
belanja

K/L/Pemda

Tingkatkan belanja
UMK-Koperasi

Pemda tingkatkan
jumlah UMK-Koperasi
di Toko Daring

Kem. Investasi / BKPM

Koneksi UMK Berkinerja Baik
di Sistem Belanja agar Bisa
Menjadi Mitra PMA/PMDN

Himbara/Asosiasi Fintech:

Kolaborasi
Dukungan Pembiayaan
UMK di Toko Daring

Percepatan Realisasi APBN/APBD

Kontrak Payung

Terobosan Aturan
Pembayaran dan
Pertanggungjawaban

Mendorong belanja PDN dan
UMK-Koperasi melalui
e-katalog dan Toko Daring

Pengembangan sistem
informasi yang semakin
memadukan tender, tender
cepat, swakelola, dan
metode-metode lainnya.

Lebih dari

Rp1.200 Triliun

Belanja Pemerintah
sebagai Peluang
Pasar bagi Produk
Dalam Negeri dan
UMKM-Koperasi.

40%

Belanja Pemerintah
untuk UMK dan
Koperasi
(sesuai Perpres
21/2021)



Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
2. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%.
3. Pemberian Preferensi harga kepada produk Dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar dari 25%, bagi Pengadaan di atas Rp1 Miliar. Preferensi harga adalah insentif kelebihan harga yang dapat diterima.



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi



Peningkatan peran UMK dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melalui



Menaikan Batasan nilai paket untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi menjadi Rp15Miliar



Kewajiban pengalokasian paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

E-MARKETPLACE

PENGADAAN PEMERINTAH



E-Marketplace

Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah (pasal 1 angka 20 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021)



E-Marketplace

Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- *e-catalog/katalog elektronik,*
- *toko daring, dan*
- *e-tendering/seleksi*



E-Purchasing

adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Dalam Jaringan (Daring)

E-KATALOG



E-Katalog

adalah system informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyedia katalog barang/jasa



E-Katalog

terdiri dari:

- Katalog nasional (dikelola oleh LKPP)
- Katalog sectoral (dikelola oleh Kementerian/Lembaga),
- Katalog daerah (dikelola oleh Pemerintah Daerah)



Cara mengakses katalog:

Pelaku usaha menyampaikan usulan produknya kepada LKPP, K/L, atau Pemerintah Daerah

Perbedaan Bisnis Proses Pencantuman Produk ke dalam e-Katalog

Sebelum Integrasi

- Usulan
- Pengumuman
- Pendaftaran dan penawaran
- Verifikasi kualifikasi penyedia
- Verifikasi produk
- Pengecekan hasil verifikasi
- Kontrak katalog
- Penayangan produk

Sesudah Integrasi

- Usulan
- Pengumuman
- Pendaftaran dan penawaran
- ~~Verifikasi kualifikasi penyedia~~
- ~~Verifikasi produk~~
- ~~Pengecekan hasil verifikasi~~
- Kontrak katalog
- Penayangan produk

TOKO DARING



Toko daring adalah system informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui system elektronik (PPSME) dan ritel daring/online.



Pelaku usaha/merchant/pedagang dapat mendaftarkan pencantuman produknya di masing-masing mitra toko daring, yang informasinya dapat diakses di laman tokodaring.lkpp.go.id.



Dalam toko daring telah disediakan kanal **BelaPengadaan** yang diperuntukkan khusus bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).



Cara mengakses ke toko daring: pelaku usaha mendaftar menjadi merchant pada PPMSE/e-marketplace yang bekerjasama dengan LKPP.



Bela

(Belanja Langsung)

Pengadaan Untuk Umkm & Koperasi



BELA PENGADAAN

adalah platform
yang dikembangkan
LKPP bersama
para marketplace:

Mendukung UMK Go Digital
lewat proses belanja langsung
di marketplace.

Proses pengadaan
makin inklusif karena
UMK kini semakin
dimudahkan.

Tingkatkan
transparansi dan
akuntabilitas.



Lebih dari **250.000 UMK** Tergabung **38.052** Transaksi

Sudahkah UMK Daerah Anda Bergabung?
Sudahkah Anda memproses belanja lewat Bela Pengadaan?

TINGKATKAN KATALOG SEKTORAL/LOKAL

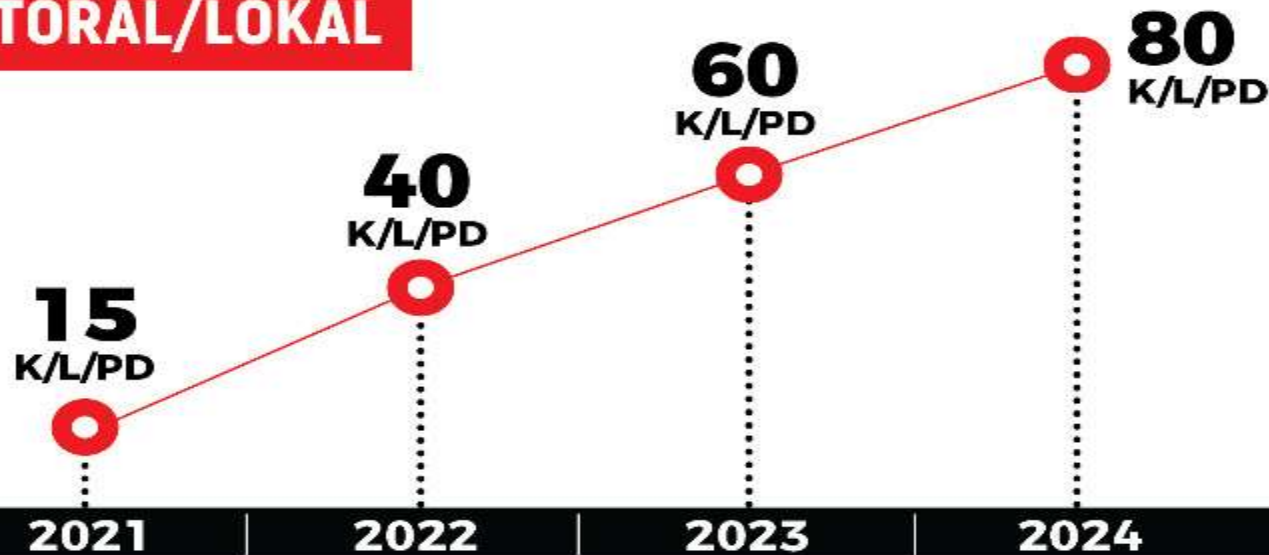


**Percepat Belanja
APBN/APBD**

**Tumbuhkan Pelaku
Usaha Daerah**

**Tetap Sesuai
Aturan**

TARGET PENAMBAHAN KATALOG SEKTORAL/LOKAL



Tiga Klaster Quick Wins LKPP:



**Memacu
Produk Dalam
Negeri**

1



**Memacu
Pelibatan UMK-
KOPERASI**

2



**Inovasi Sistem
Informasi, SDM,
Regulasi, dan
Manajemen
Stakeholder**

3



Klaster Peningkatan Produk Dalam Negeri

1

200.000 produk tayang (Maret 2021) pada e-Katalog. Prioritas PDN.

2

Integrasi sistem TKDN (Kemenperin) dengan e-Katalog (LKPP). Ber-TKDN minimal 25% otomatis tayang di e-Katalog.

3

Inisiasi dini adendum kontrak yang telah habis masa penayangan (Maret 2022), untuk diselesaikan **perpanjangan kontrak selamanya** (Februari 2022). Sehingga kontinuitas penayangan barang/jasa bisa semakin terjamin.

4

Pacu produk inovasi dan ramah lingkungan: Kolaborasi BRIN, kampus, dunia usaha.

5

Percepatan penuntasan **Katalog Sektor Kesehatan.**

6

Kontrak Payung pada KLPD untuk optimalkan serapan APBN/APBD, pembukaan tenaga kerja, menumbuhkan investasi di daerah, dan memenuhi rekomendasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi KPK.

7

Penyusunan **10 Barang belanja impor tertinggi** untuk diserahkan ke K/L terkait sebagai rekomendasi **diajak berinvestasi di Indonesia.**



Klaster Peningkatan Keterlibatan UMK-KOPERASI

Tambah komoditas baru dalam Bela Pengadaan: membuka ruang luas UMK-Koperasi.

1

Tambah jumlah UMK-Koperasi yang terlibat di Bela Pengadaan serta dorongan untuk pembelian barang/jasanya. Salah satu opsi inovasi: membuka Klinik Bela Pengadaan di semua Mal Pelayanan Publik dengan dukungan staf Pemprov/Pemkab/Pe mkot.

2

Kenaikan dua kali lipat transaksi UMK-Koperasi di Bela Pengadaan pada akhir 2022.

3



Klaster Inovasi Sistem Informasi, Sdm, Regulasi, Dan Manajemen Stakeholder

1

Integrasi sistem dengan Kementerian Investasi/OSS untuk setiap penerbitan NIB diiringi dengan opsi pemberian akun SPSE & Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

2

Jemput bola masalah/aspirasi bersama asosiasi dunia usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

3

Penyusunan regulasi “repeat order” bagi pengadaan barang/jasa untuk mempercepat serapan belanja sekaligus penerapan reward bagi penyedia barang/jasa berprestasi.

4

Semua Deputi adalah Deputi PDN & UMK-Koperasi.
Semua deputi bertugas mendukung pengembangan Sistem Katalog dan Toko Daring.



SISTEM TERINTEGRASI PENGANGGARAN-PENGADAAN-PEMBAYARAN

STRATEGI PERENCANAAN

- 1. Rencana Pembangunan Nasional
- 2. Rencana Kerja Pemerintah
- 3. RENJA
- 4. ADIK



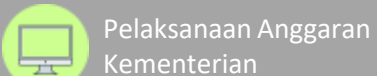
KRISNA



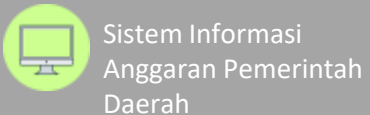
E-Musrenbang

PENGANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran



Pelaksanaan Anggaran Kementerian



Sistem Informasi Anggaran Pemerintah Daerah

PENGADAAN

Aplikasi LKPP Lainnya



Daftar Hitam Nasional



Fungsional



Advokasi



SIKaP (VMS)



Pelatihan



SiUKPBJ



Sertifikasi



Probitas Advisor

Pelaksanaan



e-Tendering



e-Purchasing



Non e-Tendering
Non e-Purchasing

Perencanaan

SiRUP

E-Kontrak



Monitoring



Data
Warehouse

Data Lain

Survei

PEMBAYARAN



OMSPAN



Aplikasi
Keuangan
Daerah

PELAPORAN



Audit



Rekomendasi
Kebijakan



SISMON
TEPRA



Tersedia



Dalam
Pengembangan

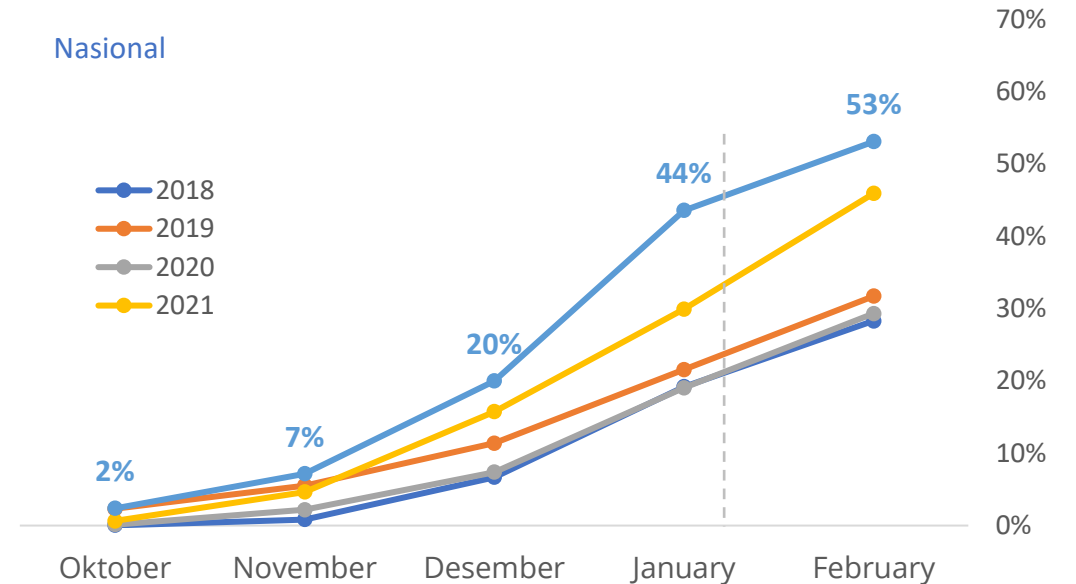
Progres Pengisian SiRUP

Tahun Anggaran 2022

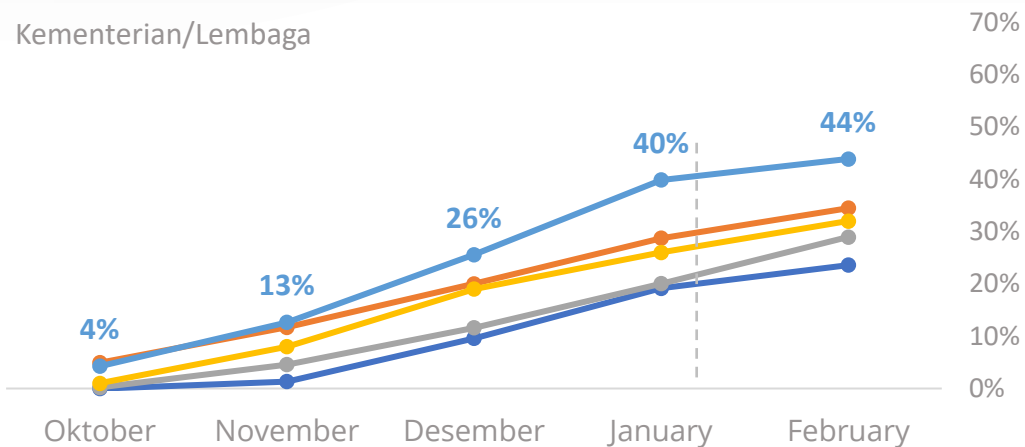
Persentase nilai paket pengadaan yang diumumkan terhadap belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- K/L perbandingan Nilai RUP yang diumumkan dengan Nilai Belanja PBJ berdasarkan Nilai Belanja Pengadaan yang tercantum dalam Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022
- Pemda perbandingan Nilai RUP yang diumumkan dengan Nilai Belanja PBJ berdasarkan Proyeksi belanja APBD TA 2022

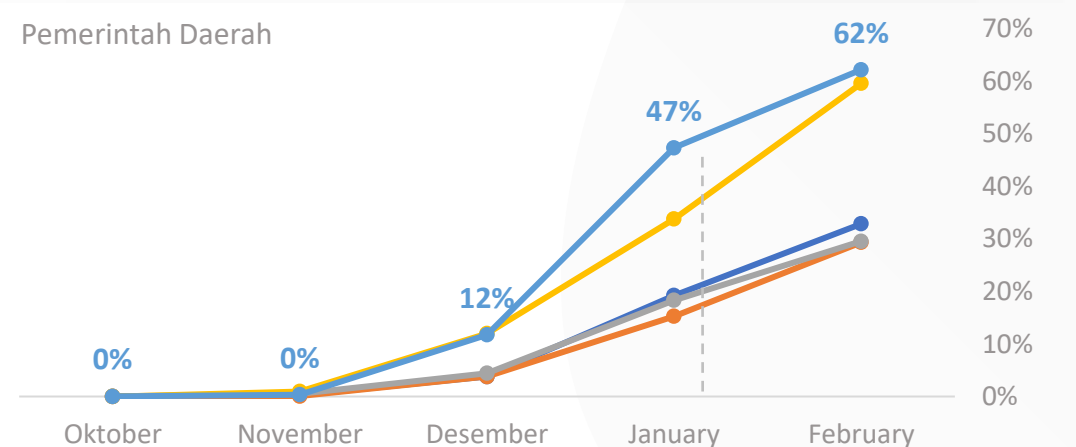
Nasional



Kementerian/Lembaga



Pemerintah Daerah



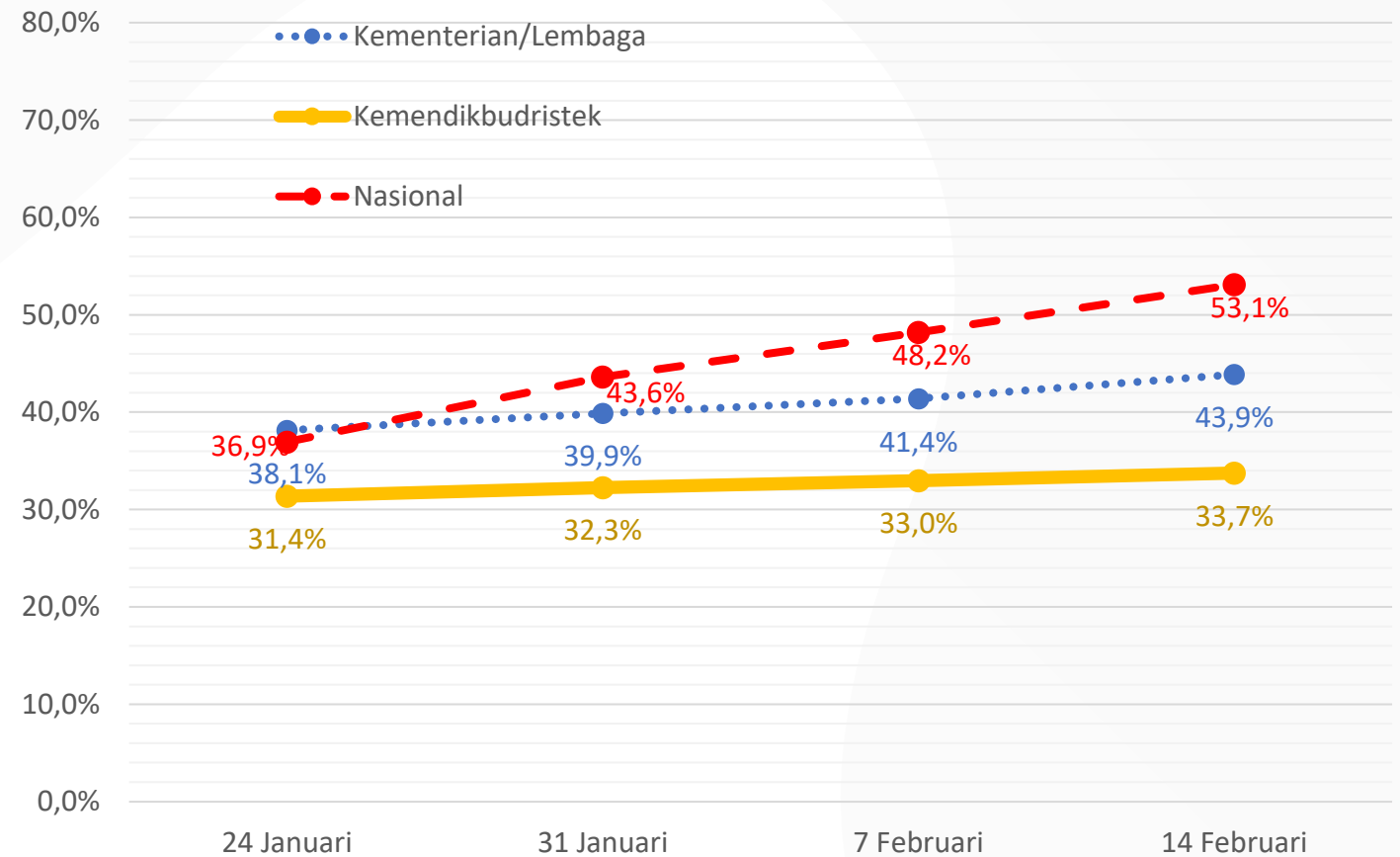
Progres Pengisian SiRUP KemendikbudRistek

Tahun Anggaran 2022

Persentase Nilai RUP yang diumumkan terhadap Nilai Belanja PBJ berdasarkan Nilai Belanja Pengadaan yang tercantum dalam Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022

Rata-rata Pengisian
SiRUP Nasional

53%



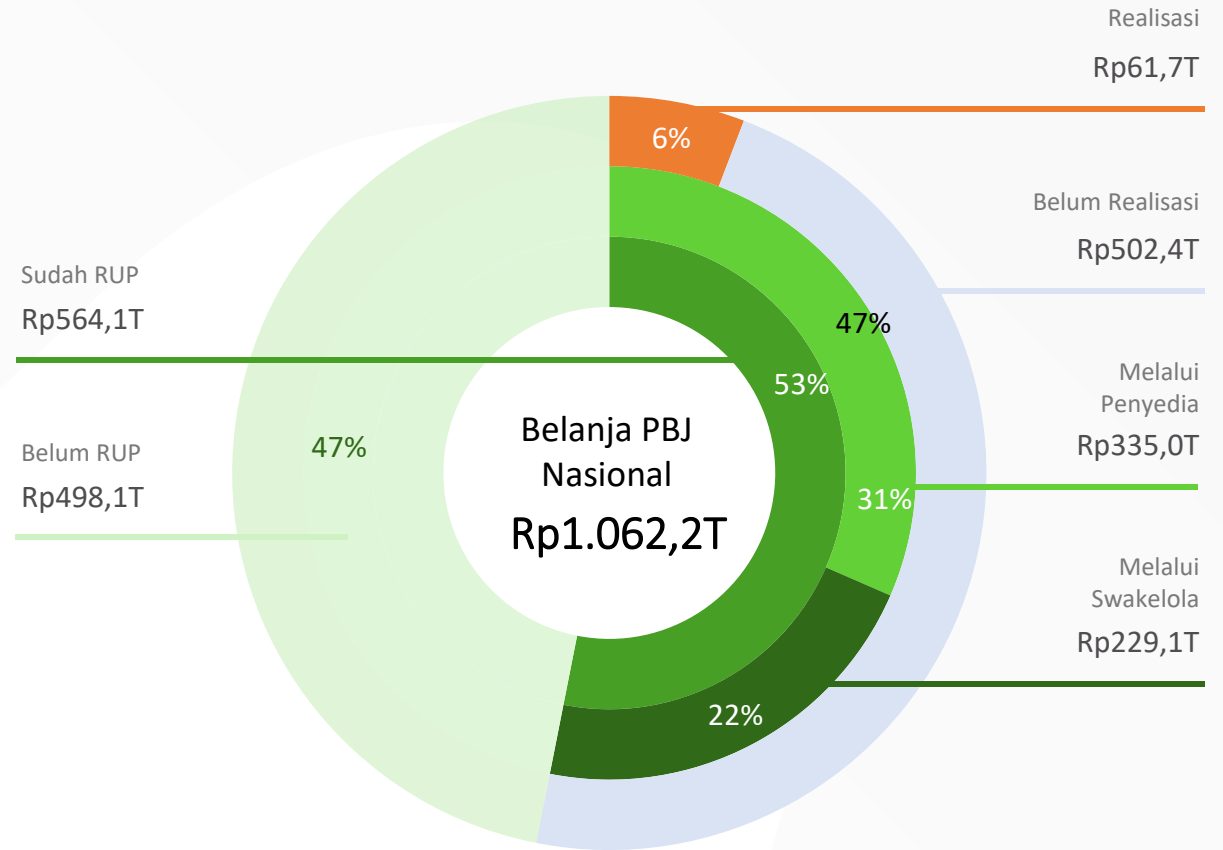
Profil Pengadaan Nasional TA 2022

Anggaran Belanja Nasional

Rp**2.181,2T**

Anggaran Belanja PBJ Nasional

Rp**1.062,2T**

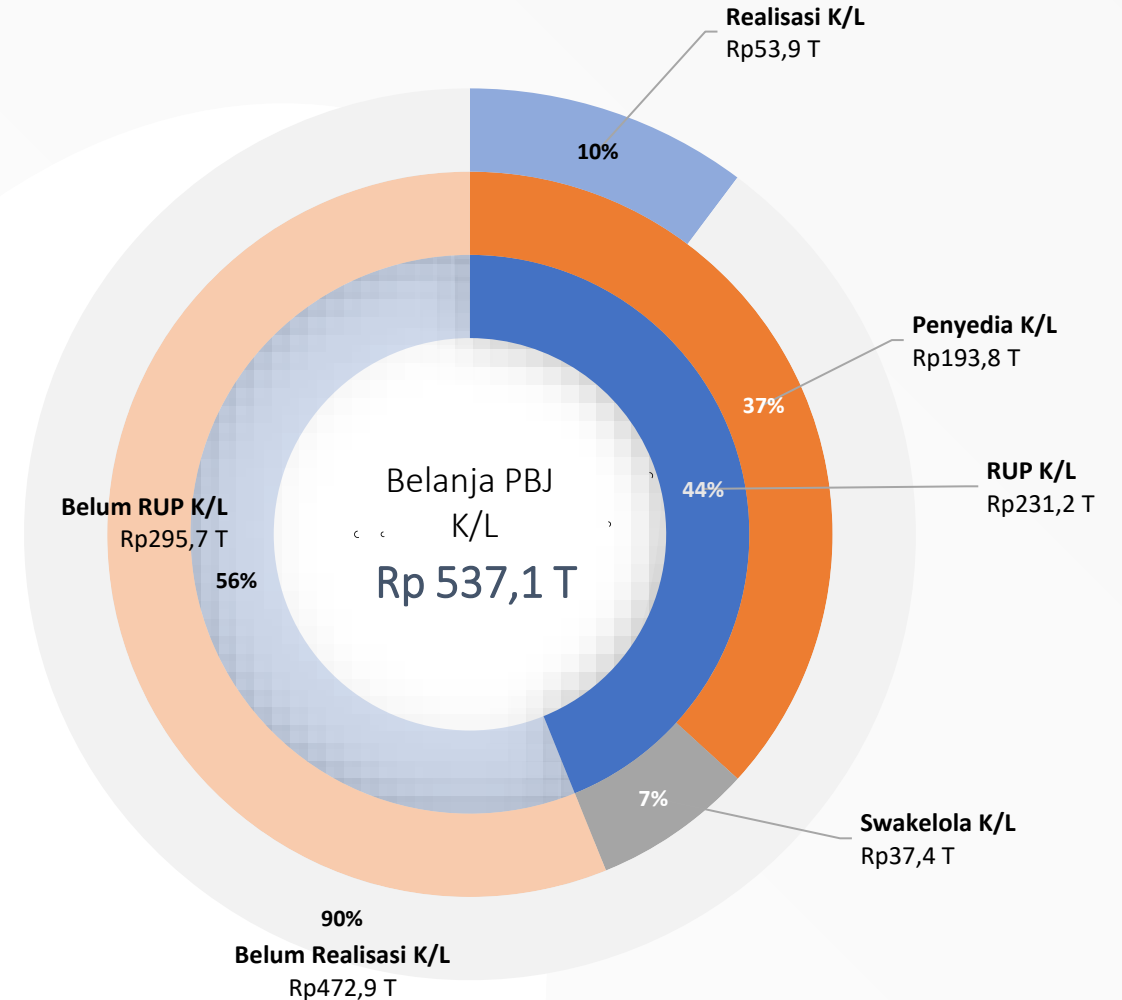
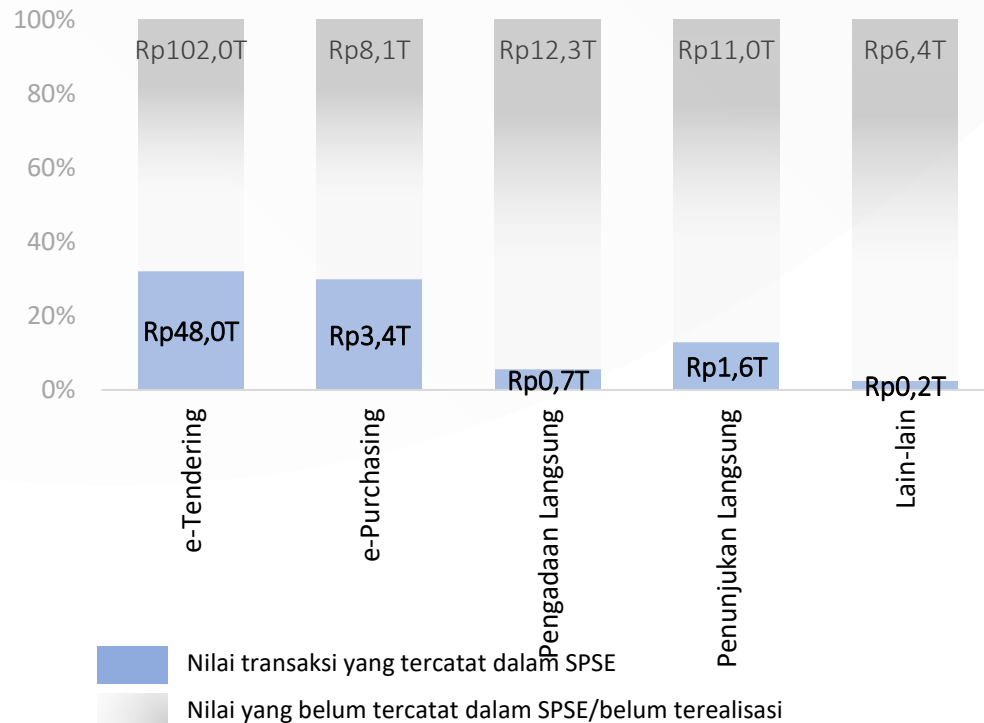


	ANGGARAN BELANJA PBJ	RUP	BELUM RUP	PENYEDIA	SWAKELOLA	REALISASI	BELUM REALISASI
NASIONAL	1.062,2	564,1	498,1	335,1	229,1	61,7	502,4
KEMENTERIAN/ LEMBAGA	526,8	231,2	295,7	193,8	37,4	53,9	177,3
PEMDA	535,4	332,9	202,4	141,3	191,7	7,8	325,1

Profil Pengadaan

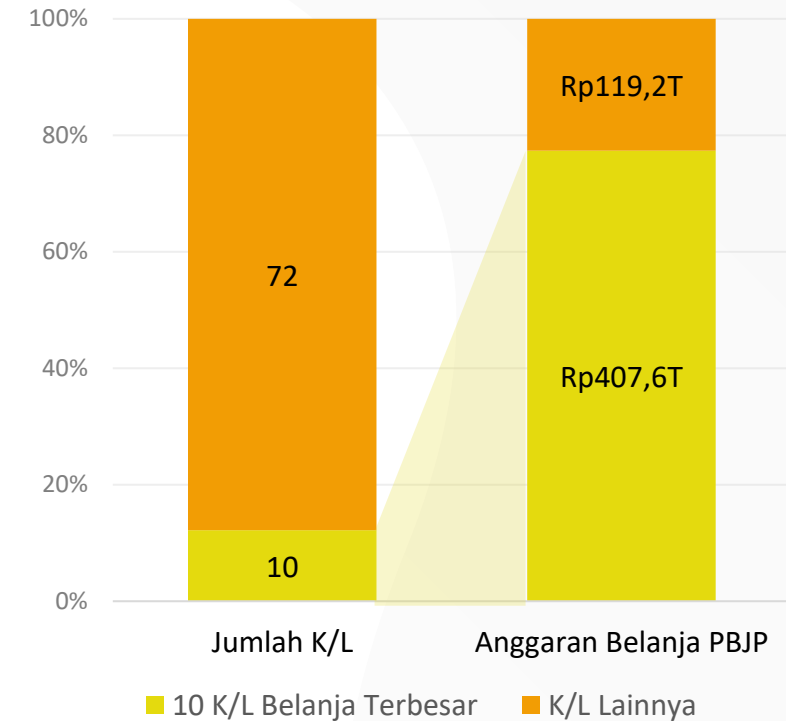
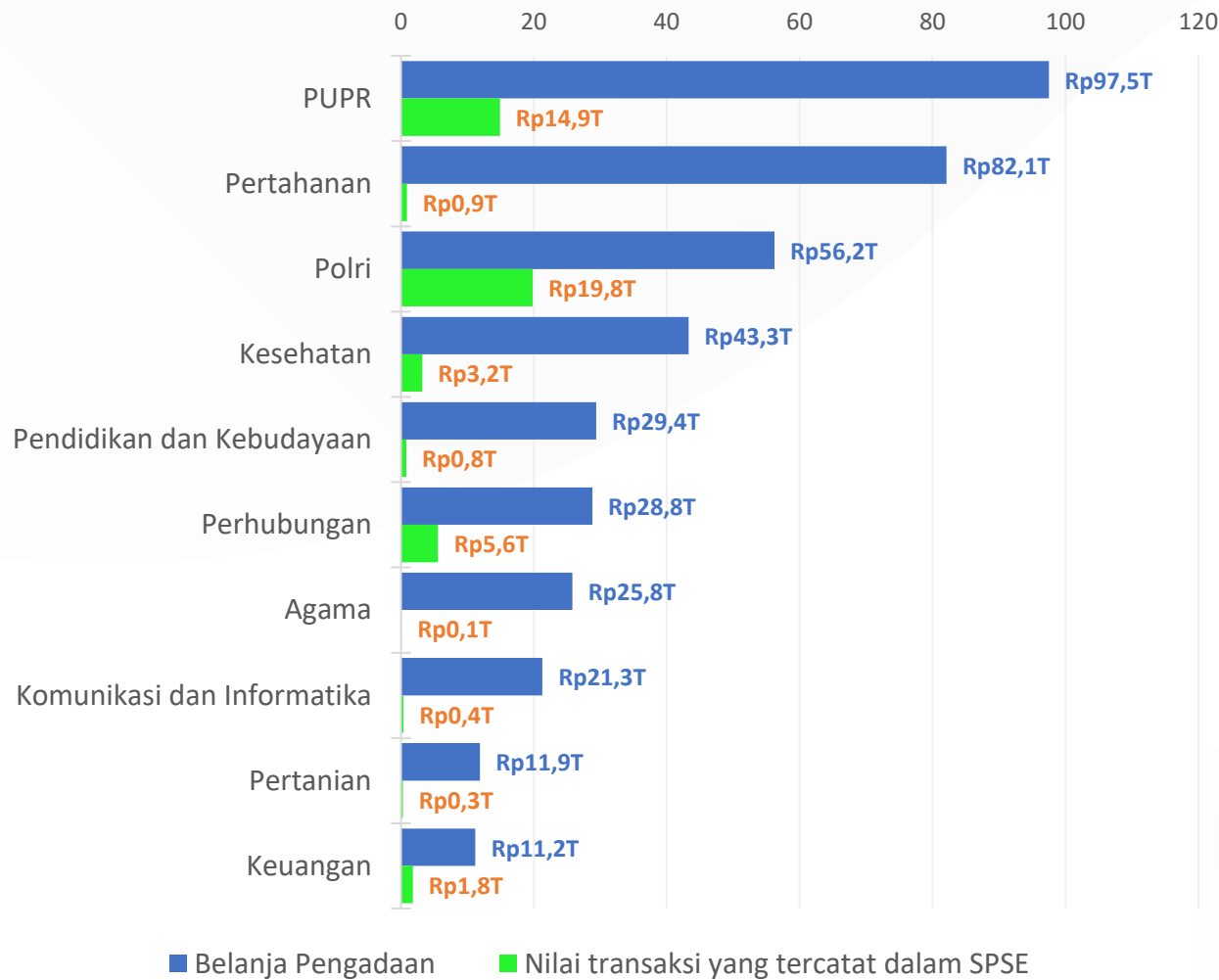
Kementerian/Lembaga TA 2022

Progres Proses Pengadaan di K/L melalui Penyedia



- Pengadaan di K/L melalui penyedia tercatat di SiRUP sebesar Rp193,8T dan melalui swakelola tercatat di SiRUP sebesar Rp37,4T, sehingga total RUP di K/L sebesar Rp231,2T
- Transaksi yang tercatat dalam SPSE sebesar Rp53,9T (23,3% dari total RUP K/L atau sebesar 10% dari total belanja PBJ K/L)

10 Profil Belanja PBJP Terbesar Kementerian/Lembaga



- Belanja pada 10 K/L terbesar (12,2% dari seluruh K/L) memiliki pagu anggaran pengadaan PBJ sebesar Rp407,6T atau sebesar 77,4% dari seluruh belanja PBJ KL.
- Sedangkan, Belanja pada 72 K/L lainnya (87,8% dari seluruh K/L) memiliki pagu anggaran pengadaan PBJ sebesar Rp119,2T atau sebesar 22,6% dari seluruh belanja PBJ KL.

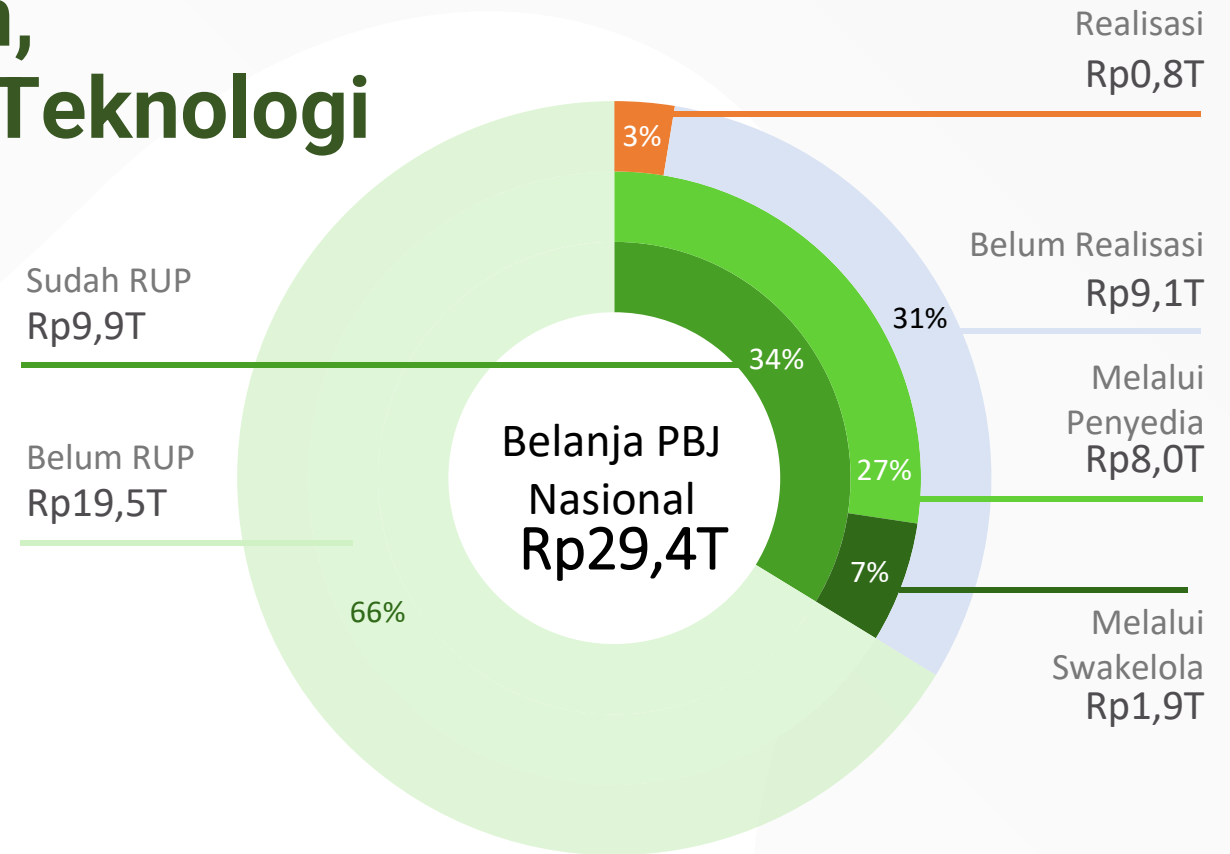
Profil Pengadaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2022

Anggaran Belanja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Rp**73,0T**

Anggaran Belanja PBJ Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

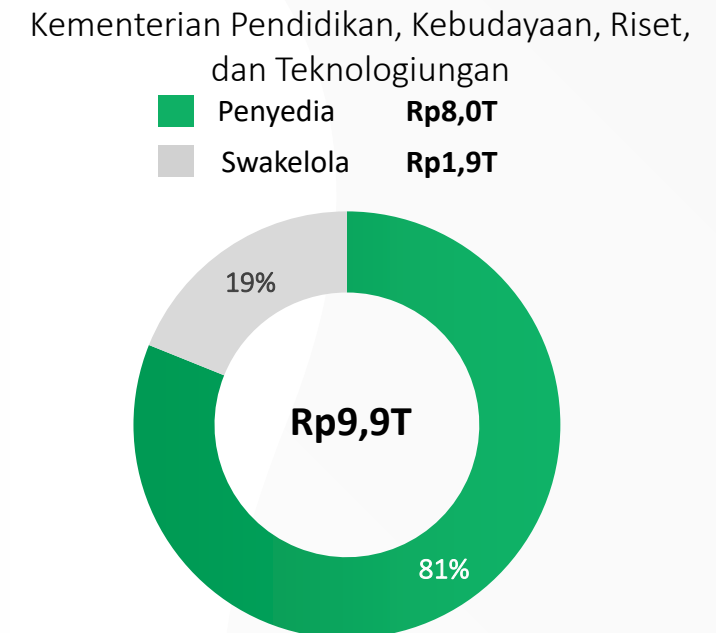
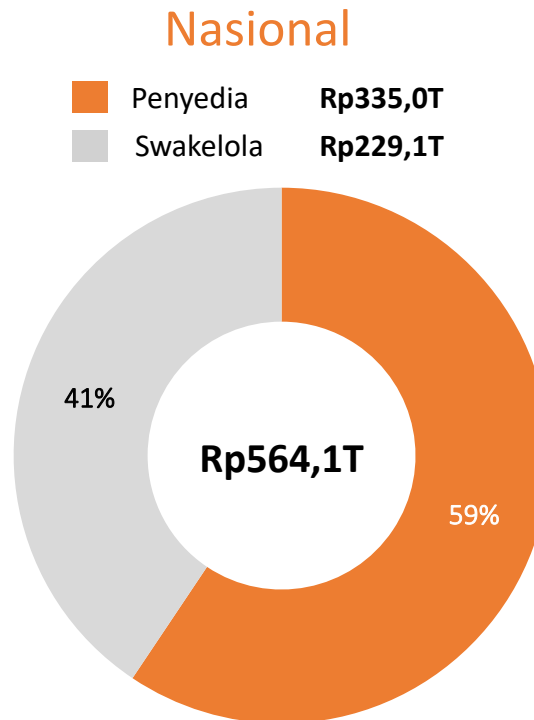
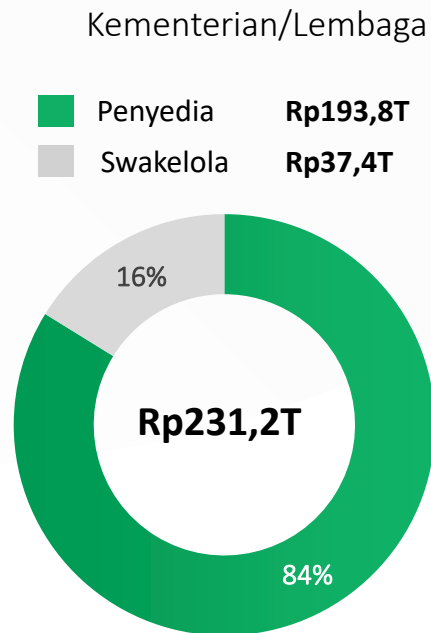
Rp**29,4T**



Penyedia & Swakelola

Nilai Pagu RUP TA 2022

Perbandingan
Penyedia dan Swakelola
(2015-2021) **74% : 26%**

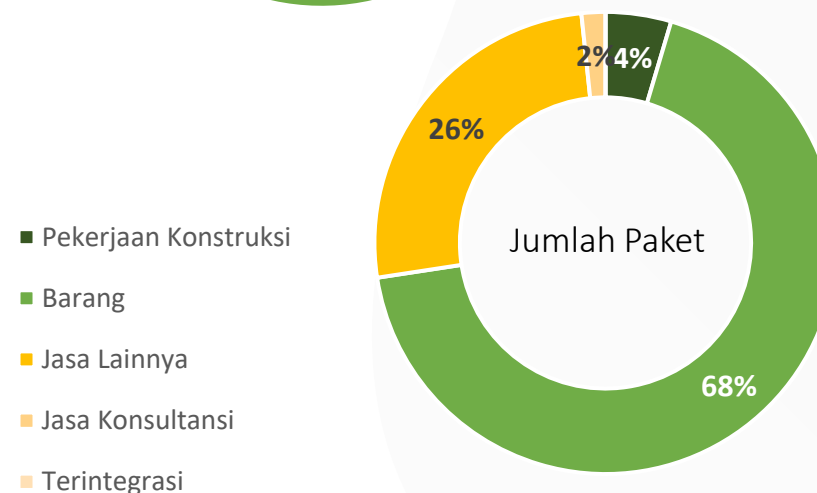
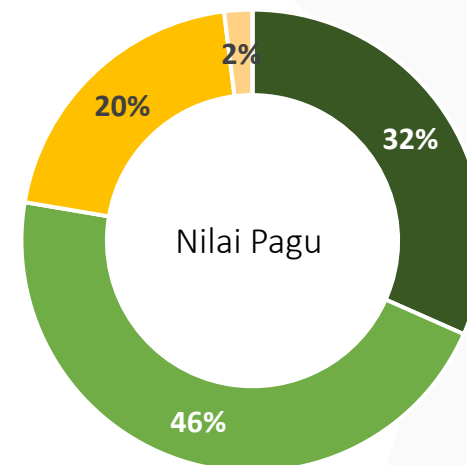
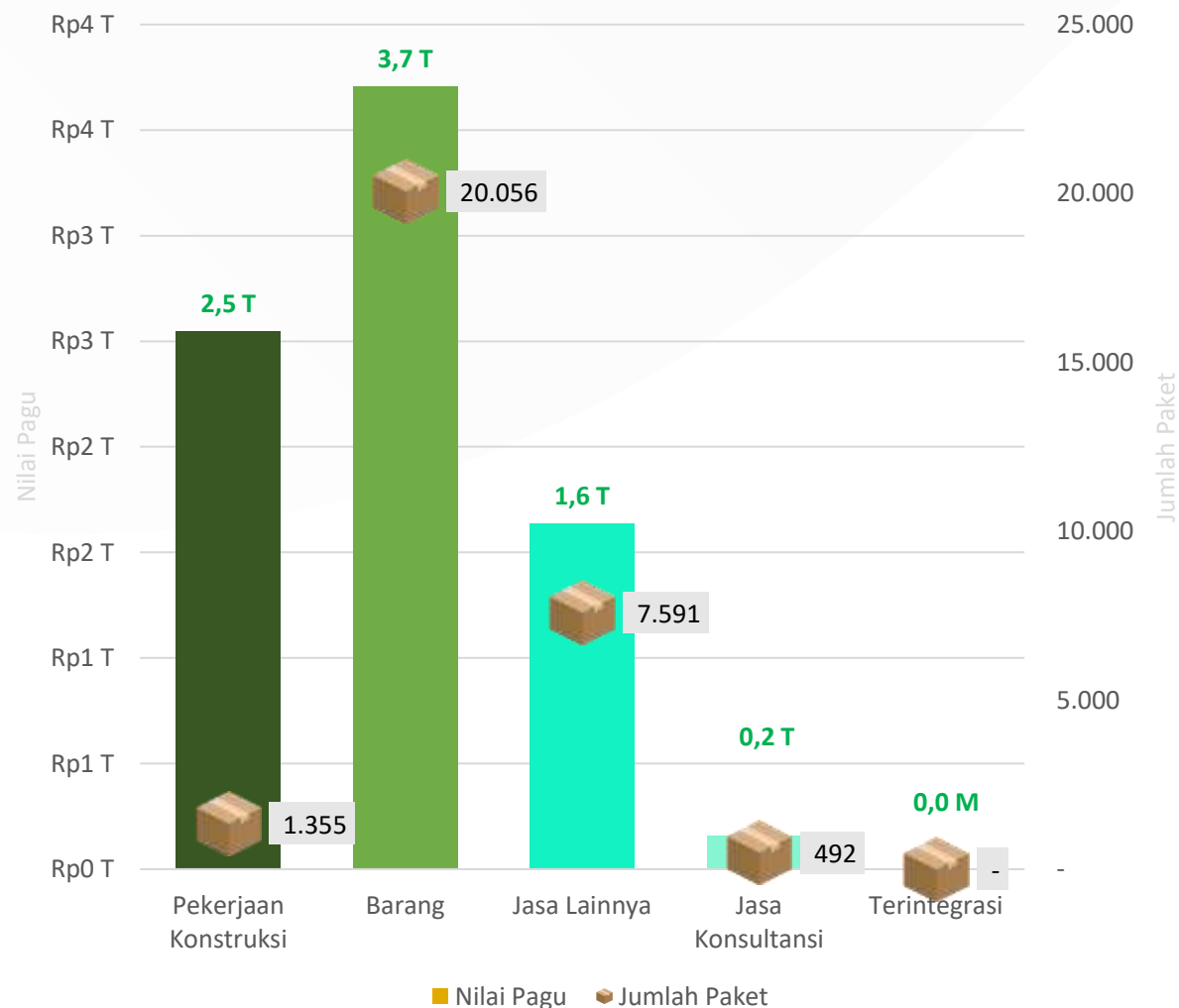


- Pengadaan melalui Penyedia secara nasional sebesar Rp335,0T (59%) dari Nilai Pagu yang diumumkan di SiRUP dan sebesar Rp229,1T (41%) dilakukan melalui Swakelola
- Pengadaan melalui Penyedia pada K/L sebesar Rp193,8T (84%) dari Nilai Pagu yang diumumkan di SiRUP dan sebesar Rp37,4T (16%) dilakukan melalui Swakelola, hal ini jauh dibawah rata-rata Swakelola Nasional
- Pengadaan melalui Penyedia pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp8,0T (81%) dari Nilai Pagu yang diumumkan di SiRUP dan sebesar Rp1,9T (19%) dilakukan melalui Swakelola

Profil Belanja PBJP

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

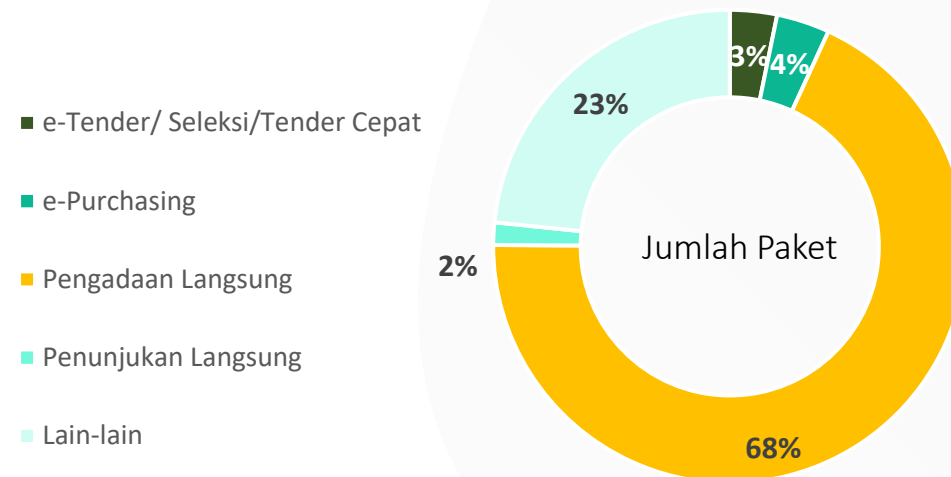
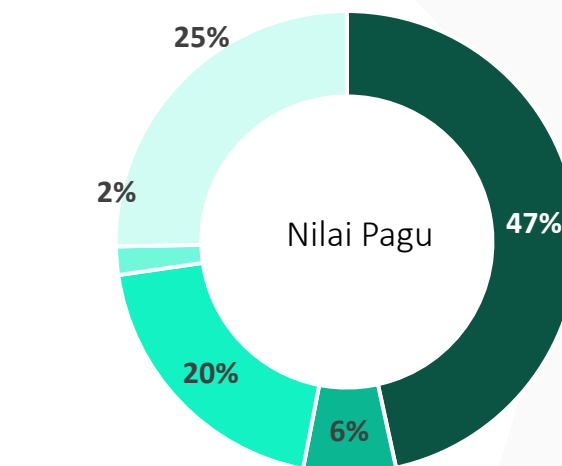
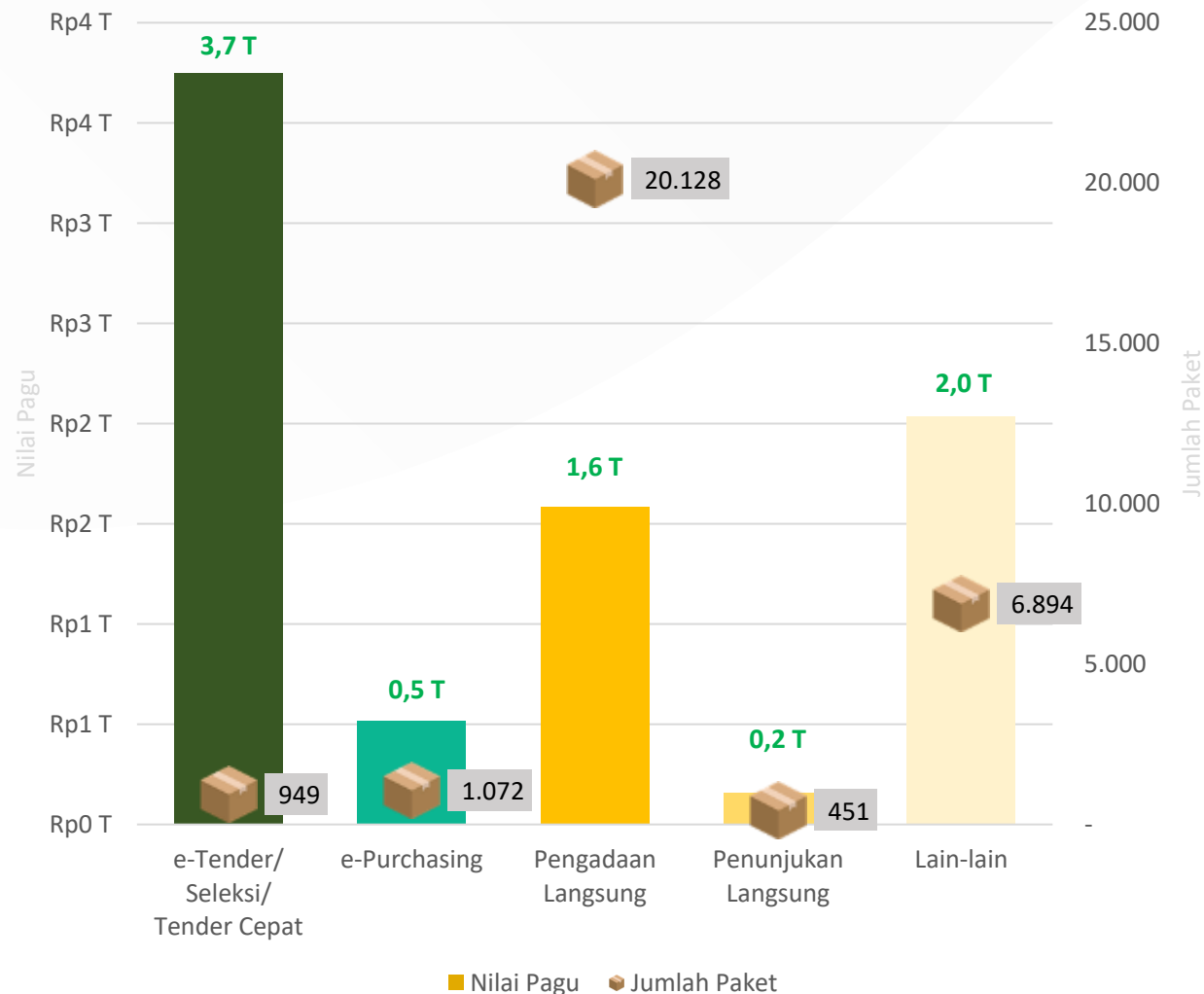
Berdasarkan Jenis Pengadaan



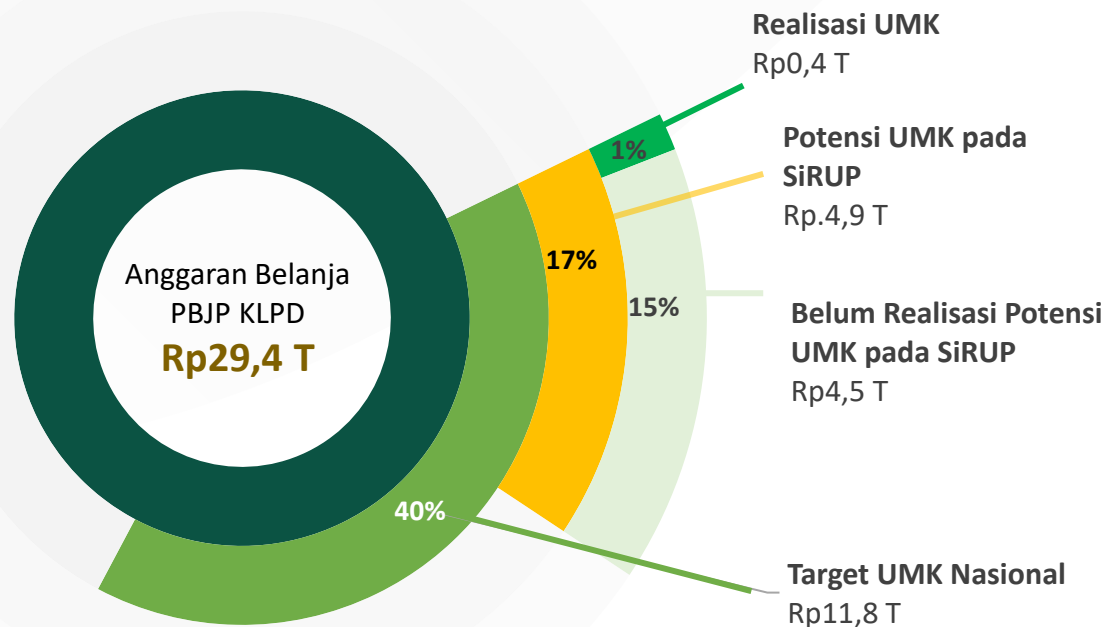
Profil Belanja PBJP

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Metode Pemilihan



Target, Alokasi dan Realisasi Nilai Belanja PBJ untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam RUP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Potensi Jumlah Paket Usaha Mikro dan Kecil

29.407

Cutoff : per 14 Februari 2022

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 mewajibkan setiap K/L/PD mengalokasikan paling kurang 40% dari belanja Pengadaan Barang/Jasa diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi. Berdasarkan anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2022, Target pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp11,5T dan sampai saat ini baru dialokasikan dalam RUP sebesar Rp4,6T atau 16% dari target 40%.

Diskusi

- Perlu mendorong untuk segera mengumumkan semua Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, agar segera diperoleh informasi kebutuhan barang/jasa Nasional. Informasi ini sangat berguna bagi pelaku usaha, khususnya UMK&Koperasi dan PDN dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas mereka.
- Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 40% anggaran PBJ untuk membeli produk UMK&Koperasi.
- Meningkatkan jumlah produk dan transaksi Katalog Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) untuk mendukung kebutuhan barang/jasa sektor Dikbudristek dan sebanyak mungkin menampung produk UMK-Koperasi dan Produk Dalam Negeri.
- Untuk kebutuhan barang yang tidak bisa ditampung dalam katalog sektoral dan belum tayang dalam ekatalog, agar segera menyampaikan daftar barang/jasa tersebut kepada LKPP.
- Untuk pekerjaan konstruksi, agar mensyaratkan penggunaan sebanyak mungkin bahan/material konstruksi produk daerah setempat atau produk dalam negeri.

www.LKPP.go.id



Akhir Presentasi

Terima Kasih

